



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI
TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KE KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 14 S.D. 16 JUNI 2024

Komisi X DPR RI melakukan Kunker spesifik ke Kota Tangerang dalam rangka melakukan pengawasan mengenai pembiayaan pendidikan, dengan fokus terhadap pemenuhan *mandatory spending* 20% bidang pendidikan dalam APBD, evaluasi terhadap program akses dan percepatan wajib belajar 13 tahun serta strategi pencapaiannya. Adapun tujuan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan terkait pembiayaan pendidikan selain dana transfer daerah melalui APBN, serta komponen pembiayaan pendidikan yang dikelola daerah

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS dengan anggota tim dari perwakilan masing-masing fraksi. Kunjungan ini diterima langsung oleh Pj. Walikota Tangerang dalam di aula Pemkot. Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPMP Provinsi Banten, perwakilan Kepala Sekolah, Komite Sekolah PAUD, SD dan SMP (Negeri dan Swasta), serta perwakilan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan Kota Tangerang. Dalam pertemuan ini, hadir pejabat dari Kemendikbudristek, yaitu Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A. (Direktur Guru Pendidikan Dasar, dan Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak. (Direktur Sekolah Menengah Atas).

Selama pertemuan dilakukan dialog antara tim kunjungan kerja Komisi X dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Mengenai pemenuhan *mandatory spending* 20% APBD, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa Kota Tangerang telah memenuhi amanat konsitusi dan UU Sisdiknas, dimana Pemkot Tangerang pada tahun 2024 telah mengalokasikan 24% anggaran pendidikan dalam APBD nya, dengan alokasi sebesar Rp1.316.318.865.880 dari total APBD TA 2024 sebesar Rp5.383.876.724.064.

Terdapat permasalahan mengemuka yang disampaikan oleh dinas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Tangerang yaitu (1) belum adanya SLB Negeri, dimana hal itu merupakan kewenangan provinsi; (2) adanya siswa asal Kota Tangerang di SMA dan SMK yang ijazahnya ditahan karena alasan biaya dan lain-lain, dalam hal ini Pemkot Tangerang siap untuk membantu, namun tidak bisa diambil karena itu kewenangan provinsi; (3) kurangnya dukungan pemerintah provinsi ketika siswa SD dan SMP/ sederajat di Kota Tangerang mengikuti even nasional dan/atau internasional.

Berbagai permasalahan, temuan dan usulan akan menjadi bahan tim kunjungan kerja dalam melakukan pembahasan bersama pemerintah pada rapat kerja yang akan datang.

Kota Tangerang, 14 Juni 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang